



PAPARAN UMUM

platform pembayaran pemerintah

- » **Digitalisasi di Perbendaharaan Saat Ini**
- » **Konsep Platform Pembayaran Pemerintah**
- » **Perubahan Proses Bisnis**
- » **Pentahapan dan *Milestone* Platform Pembayaran Pemerintah**
- » **Payung Hukum Piloting**
- » **Tanggal-Tanggal Penting**

DIGITALISASI PERBENDAHARAAN

PMK 62/2023

PMK 190/2013



Semua satker,
semua transaksi

S-101/MK.5/2022
PMK 171/2021



Piloting Tahap II
45 KL; 5.012 Satker
Semua transaksi

PMK 182/2022



Internal Kemenkeu
Gaji & Common
Expenses

APA ITU PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

Platform Pembayaran Pemerintah adalah **integrasi/interkoneksi** sistem antara **Core System** dengan **Sistem Pendukung, Sistem Mitra, dan Sistem Monitoring** dengan tujuan **pembayaran dapat dilakukan secara elektronik** dan diakses pejabat yang berwenang dari berbagai kanal pembayaran yang memungkinkan.



Interkoneksi

Interkoneksi sistem pembayaran dengan sistem pendukung dan sistem mitra



Transaksi

Mengakomodasi transaksi belanja pegawai, common expense, pengadaan sederhana, dan perjalanan dinas



Pengguna

Digunakan oleh K/L yang memenuhi prasyarat untuk interkoneksi dengan PPP

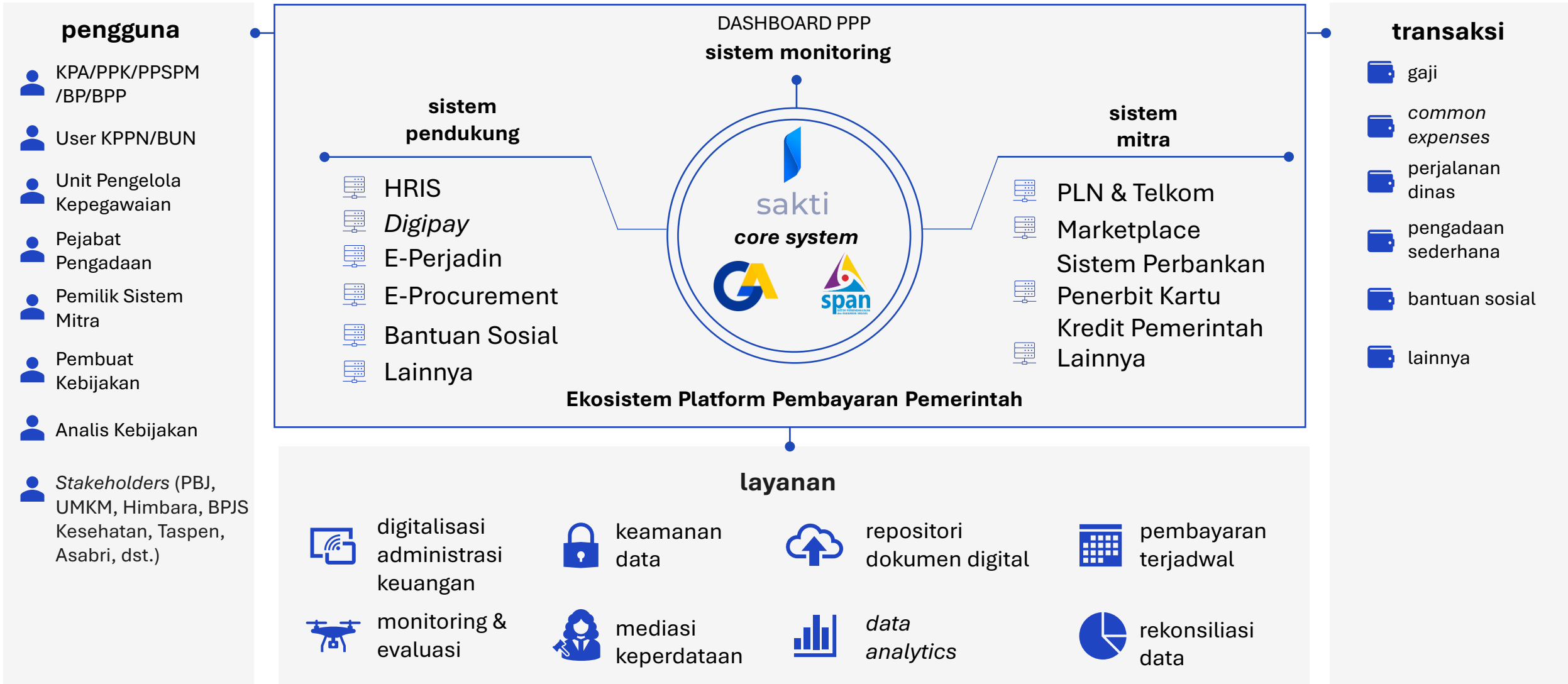


Dashboard

Memiliki dashboard untuk monev, rekonsiliasi, dan data analytics



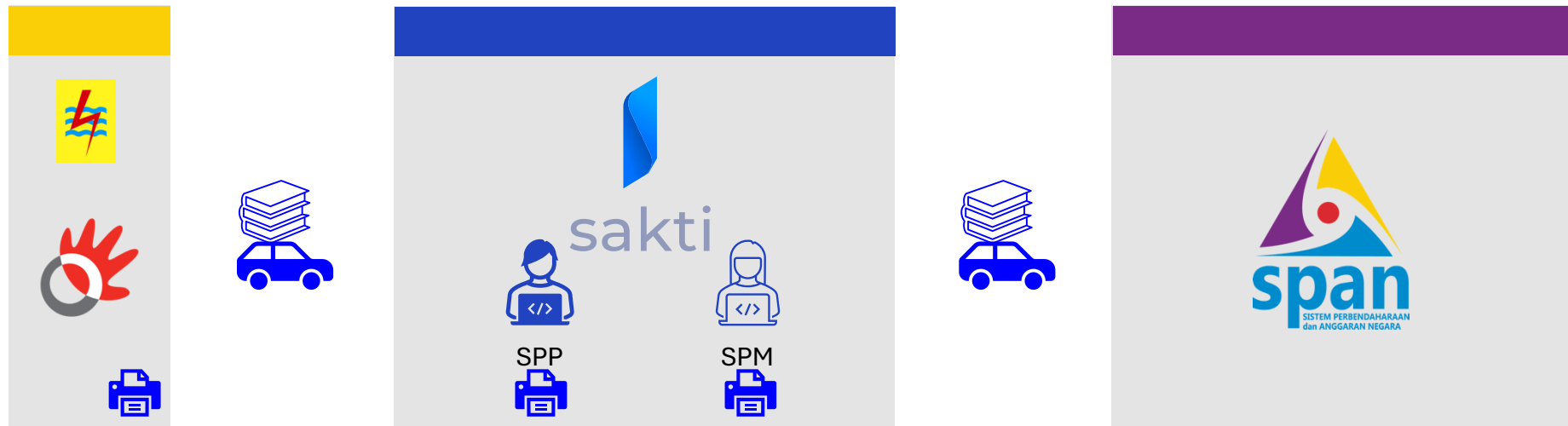
APA ITU PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH



PERUBAHAN PROSES BISNIS

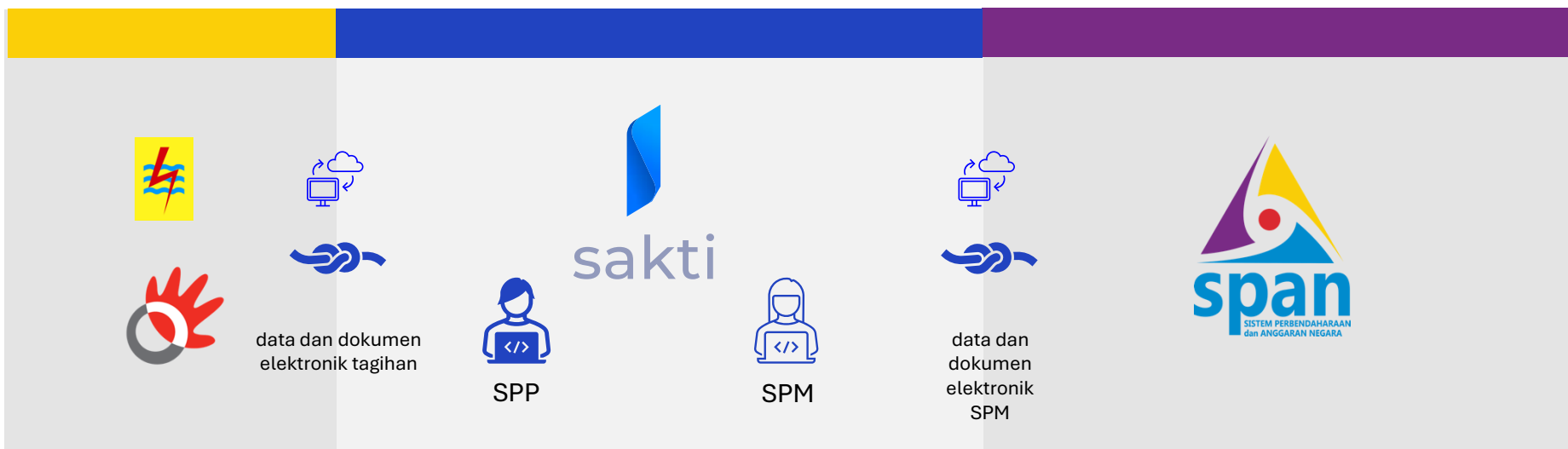
- Sistem PLN, Telkom tersendiri. Sistem tidak interkoneksi.
- Dokumen tagihan telepon dan listrik didapatkan dengan cara beragam.
- Semua dokumen pembayaran dicetak.
- Berkas masih diantar ke KPPN.

before



after

- Sistem PLN, Telkom interkoneksi dengan SAKTI
- Semua proses di dalam sistem DJPb
- Dokumen tidak perlu dicetak, tersedia dalam system (PDF Tagihan, SPP, SPM)
- Berkas diantar ke KPPN melalui SAKTI (elektronik)



MANFAAT PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

simple



interkoneksi

menghubungkan core system dengan berbagai sistem



single entry

entry data hanya dilakukan di luar core system



digitalisasi

digitalisasi proses pembayaran belanja pemerintah pusat

data analytics



big & detail

data terkait belanja pemerintah pusat tersedia dengan sangat rinci



digital

data lebih lengkap dan dapat diolah untuk berbagai macam keperluan



dashboard

maintenance kualitas data dan menyajikan data sesuai dengan keperluan user (*customizable*)

transparent



progress transaksi

saat dalam proses pembayaran, posisi dokumen pembayaran pemerintah dapat dipantau.



audit trail

data lebih lengkap dan dapat diolah untuk berbagai macam keperluan



rekonsiliasi

maintenance kualitas data dan menyajikan data sesuai dengan keperluan user (*customizable*)

effective



internal

Scheduled payment mendukung pengelolaan kas, mengurangi jumlah retur, dan akurasi transaksi lebih terjamin.



eksternal

1. dengan digitalisasi, terjadi pengurangan pekerjaan administrative dan klerikal pada **K/L**, sehingga dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. **penerima manfaat** mendapatkan kepastian pembayaran sehingga dapat membantu manajemen kas.

efficient



saving up to



± 17,5 hektar



± 19 ribu pohon/tahun



± 7 juta jam/tahun



± 1 T per tahun

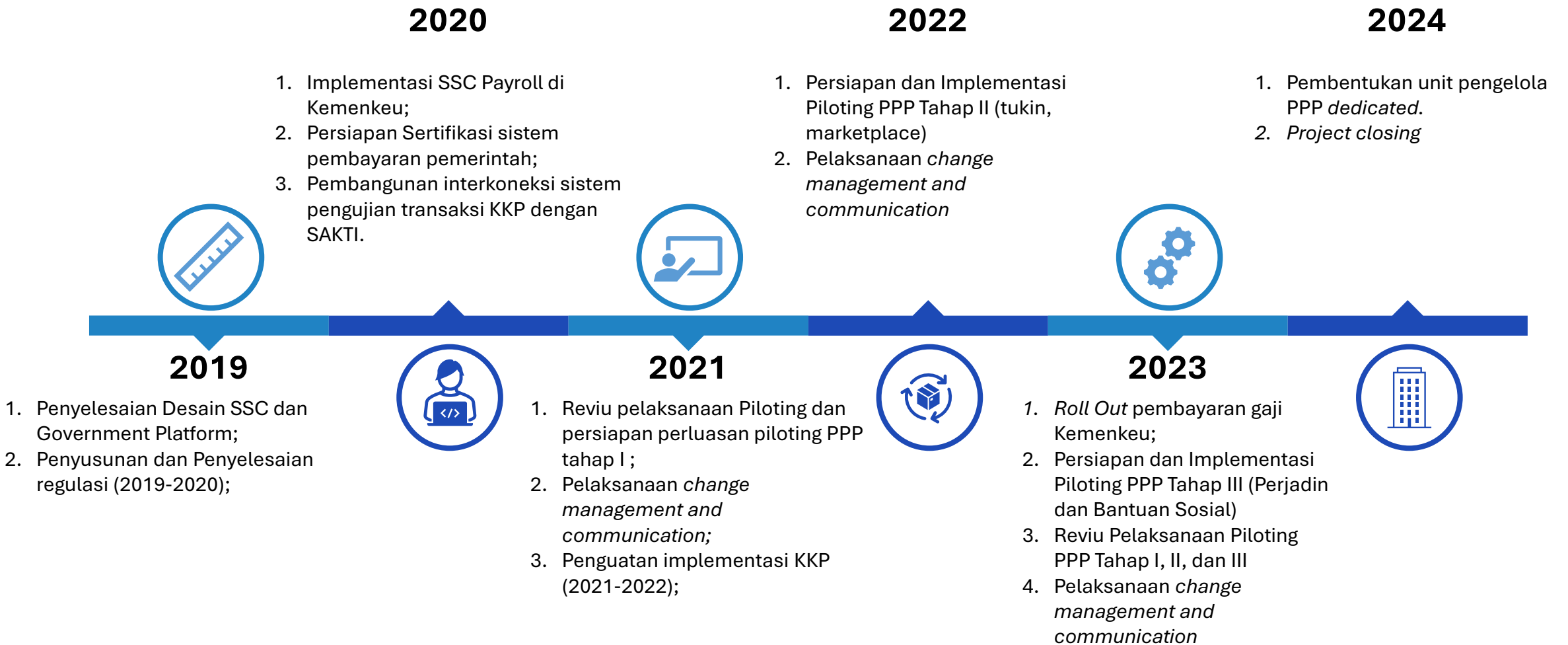
Jenis Pembayaran



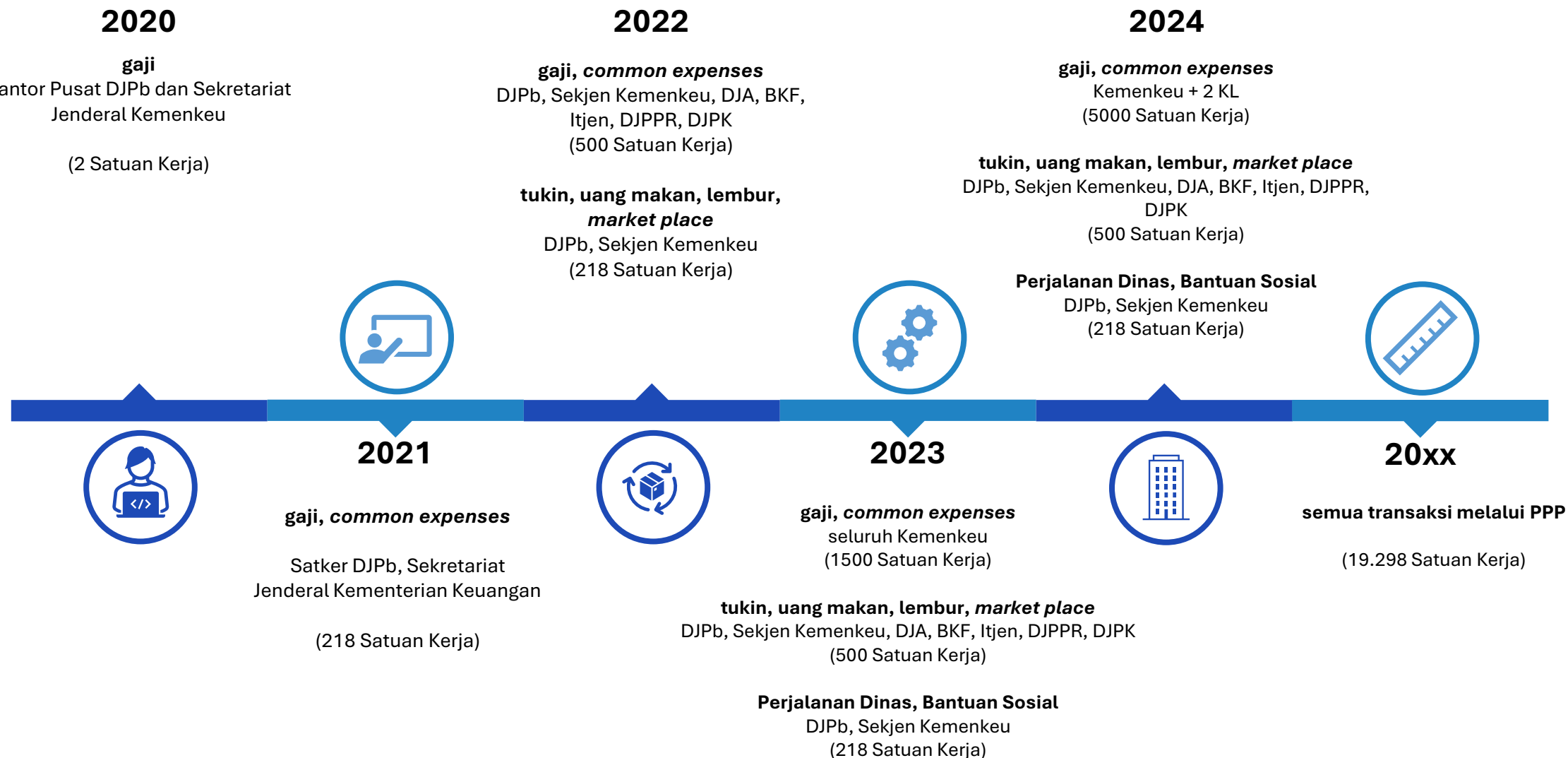
Peserta Piloting



MILESTONE PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH



DETIL MILESTONE PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH



UNDANG-UNDANG

1. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU 11 Tahun 2008 dan perubahannya (UU 19 Tahun 2016) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

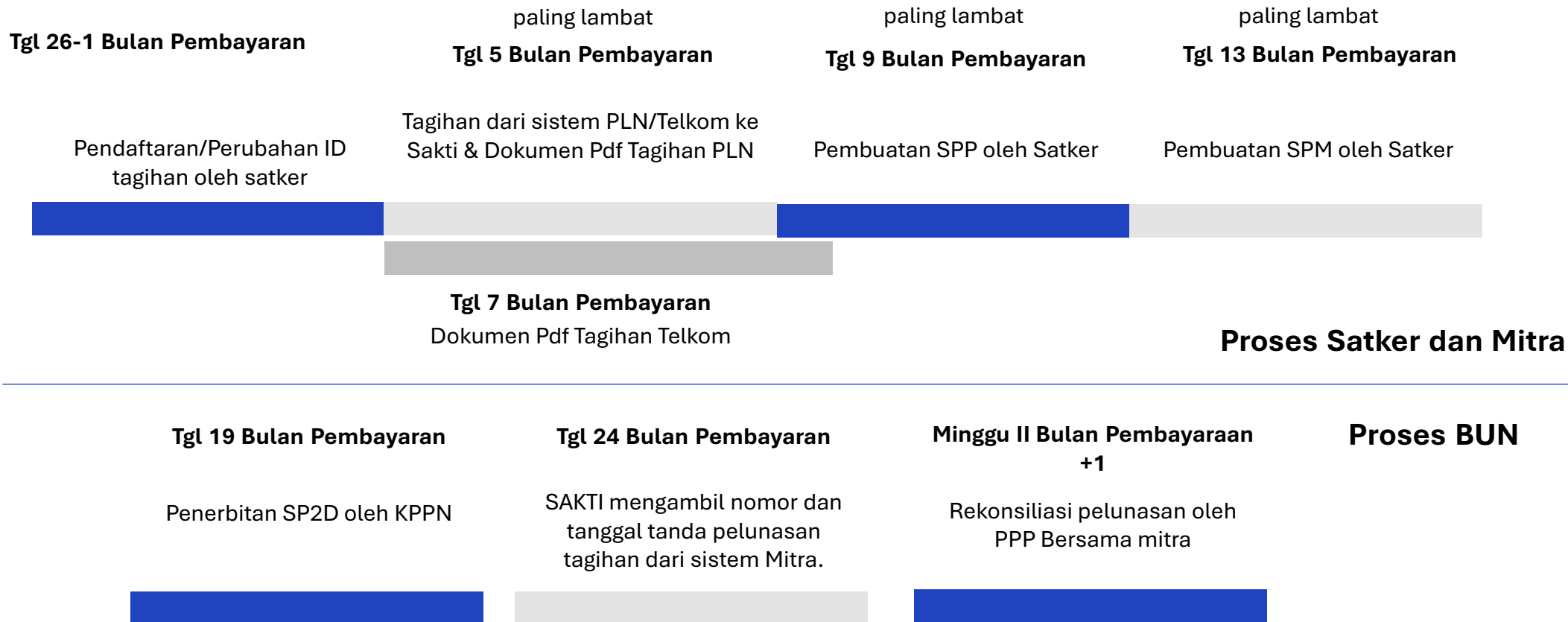
MENTERI

1. PMK 182 Tahun 2022 tentang Piloting Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)
2. PMK 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
3. PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
4. KMK 3 Tahun 2022 tentang Peserta Piloting Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN Melalui PPP Tahap I

DIRJEN Pb

1. Kepdirjen Perbendaharaan 195 Tahun 2021 tentang SOP Piloting Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN melalui PPP
2. Perjanjian Kerja Sama DJPb dan PT PLN Nomor 293 Tahun 2021
3. Perjanjian Kerja Sama DJPb dan PT Telkom Tbk Nomor 294 Tahun 2021

TIMELINE TRANSAKSI *COMMON EXPENSES*



DIGITALISASI PERBENDAHARAAN

PMK 62/2023

PMK 190/2013



Semua satker,
semua transaksi

S-101/MK.5/2022
PMK 171/2021



Piloting Tahap II
45 KL; 5.012 Satker
Semua transaksi

PMK 182/2022



Internal Kemenkeu
Gaji & Common
Expenses



terima kasih